

INDONESIA DI TENGAH HIMPITAN PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT DAN CHINA

Sonny

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
email: sonny.majid@gmail.com

Paper Accepted: 25 Maret 2020
Paper Reviewed: 26-31 Maret 2020
Paper Edited: 01-15 April 2020
Paper Approved: 25 April 2020

ABSTRAK

Disadari atau tidak, geopolitik dan geoekonomi seiring dengan berjalannya waktu, skemanya terus mengalami perubahan yang sedemikian cepat. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, menjadi isu ekonomi dunia yang tengah tren. Dampaknya banyak dirasakan oleh banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Dengan menguasai Indonesia, maka negara-negara yang berkepentingan (penetrasi pasar – ekspansi ekonomi) dipastikan bisa mengendalikan geopolitic chokepoints di tingkat global. Siapa yang menguasai jalur – perlintasan di Indonesia, maka dia akan menguasai pasar. Dalam penelitian ini, akan diulas mengenai potret menyangkut perang dagang antara Amerika Serikat dan China, berikut dampaknya terhadap Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui dampak terhadap Indonesia akibat perang dagang antara AS dan China. Penelitian pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur atau dokumen, baik dari jurnal, buku maupun informasi dari internet yang membahas mengenai perang dagang. Di Indonesia sendiri, dampak perang dagang kedua negara tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan. Sebab, produk yang dikenakan tarif perang dagang bukan fokus pada produk ekspor Indonesia untuk kedua negara. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China sebenarnya juga memberikan peluang pasar untuk memenuhi kekosongan pasar dari kedua negara. Indonesia juga memiliki potensi menjadi negara yang diperhitungkan sebagai kekuatan besar dalam rivalitas major power dalam eskalasi geopolitik maupun geoekonomi. Indonesia harus lebih memaksimalkan memperjuangkan kepentingannya di saat negara-negara lain mencoba mengambil manfaat dari perang dagang Amerika Serikat dan China. Indonesia harus sudah mulai memprioritaskan peningkatan produk-produk nasional.

Kata Kunci: Perang Dagang, Amerika Serikat, China

PENDAHULUAN

Disadari atau tidak, geopolitik dan geoekonomi seiring dengan berjalannya waktu, skemanya terus mengalami perubahan yang sedemikian cepat. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, menjadi isu ekonomi dunia yang tengah tren. Dampaknya

banyak dirasakan oleh banyak negara, tak terkecuali Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara posisinya memang strategis. Dari sisi letaknya saja, Indonesia sudah barang tentu menjadi rebutan sebagai negara pangsa pasar (negara market place) dari seteru (ring tinju) perang dagang kedua negara yang sama-sama ingin merebut klaim “negara

super power – adidaya.” Indonesia berposisi silang, diapit dua benua Asia dan Australia, dan dua samudera: Hindia dan Pasifik.

Lagi-lagi dengan posisi yang demikian, Indonesia bisa dianggap sebagai epicentrum global. Indonesia merupakan satu-satunya negara cincin api (dilalui garis khatulistiwa) sehingga memiliki kelengkapan sumber daya alam – sumber energi berlimpah, termasuk di dalamnya kekuayaan sosial budaya seperti keragaman etnis, bahasa, agama, budaya. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki inilah maka Indonesia bisa diistilahkan sebagai “raw material” khususnya bagi sektor industri-industri dunia.

Karena dominan negaranya adalah perairan, maka 40 persen jalur perdagangan melalui laut (pelayaran) melintasi bentangan laut Indonesia. Ini artinya Indonesia masuk dalam rute “Sealane of Communications (SLOCs).

Dengan menguasai Indonesia, maka negara-negara yang berkepentingan (penetrasi pasar – ekspansi ekonomi) dipastikan bisa mengendalikan *geopolitic chokepoints* di tingkat global. Siapa yang menguasai jalur – perlintasan di Indonesia, maka dia akan menguasai pasar. Dalam penelitian ini, akan diulas mengenai potret menyangkut perang dagang antara Amerika Serikat dan China, berikut dampaknya terhadap Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui dampak terhadap Indonesia akibat perang dagang antara AS dan China.

Penelitian pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moelong, 2005: 4).

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur atau dokumen, baik dari jurnal, buku maupun informasi dari internet yang membahas mengenai perang dagang. Literatur/dokumen adalah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen/literatur bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012: 326).

Sedangkan pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Ridwan, 2004:138). Data-data berupa literatur atau dokumen selanjutnya diolah melalui reduksi dan menyajikan data dan selanjutnya menarik

kesimpulan. Analisis data ini disebut sebagai mengolah dan menafsirkan data (Muhajir, 1996:104).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perang Dagang

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China berawal ketika Amerika Serikat mengalami defisit. Defisit yang kian naik itu akhirnya membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kebijakan penetapan bea masuk impor produk asal China. Kebijakan oleh Presiden Donald Trump ini memicu ketegangan antar kedua negara yang sampai sekarang masih tercatat sebagai negara yang menguasai pertumbuhan ekonomi dunia. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump direspon oleh China dengan penerapan tarif yang lebih tinggi atas impor Amerika Serikat (Aldia, 2020).

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang kian memanas pastinya menimbulkan pertumbuhan ekonomi global terhambat. Amerika Serikat memberlakukan tarif lebih tinggi terhadap China, sebagai respon terjadinya ketidakseimbangan perdagangan antar-kedua negara. China pun menerapkan pungutan yang lebih tinggi atas impor Amerika Serikat.

Indonesia sudah barang tentu mendapat imbas atas perang dagang tersebut. Kekawatirannya tak lain lantaran pasar Indonesia bakal dibanjiri produk-produk Amerika Serikat dan China. Namun jika Indonesia bisa memanfaatkan perseteruan dagang tersebut, akan terbuka peluang bagi Indonesia menggarap pasar yang terbuka di Amerika Serikat dan China. Hal itu bisa terjadi karena pangsa pasar China tertutup di Amerika Serikat, demikian sebaliknya. Akan tetapi bukan berarti perang dagang itu tidak punya efek positif (Yoga, 2019).

China Mendirikan AIIB untuk Mengimbangi World Bank

Gelagat China untuk menjadi negara adidaya sebenarnya semakin jelas terlihat ketika negeri Tirai Bambu itu menggagas Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) – Bank Investasi Infrastruktur Asia yang merupakan konglomerasi keuangan dunia untuk mengimbangi World Bank dan International Monetary Fund (IMF).

Konglomerasi ini modal awal pendiriannya mencapai 100 miliar dollar AS. Terakhir disebut-sebut sebanyak 35 negara telah bergabung. Sebagai langkah awal penetrasi ke Indonesia adalah persetujuan pendanaan sebesar

433 juta dollar AS, dimana 216 juta dollar AS digunakan untuk membiayai perbaikan dan peningkatan infrastruktur.

Pertanyaannya apakah benar demikian? Dalam arti jika AIIB dilahirkan untuk mengimbangi apa yang disebut dengan “kapitalisme institusional” seperti diwakili oleh World Bank, WTO, IMF dan lain-lain. Jika melihat sistem yang diterapkan China, sepertinya tidak. China sendiri menerapkan dua sistem, pertama dalam urusan internal (dalam negeri) negaranya China komunis, meski belakangan mereka mengaku bukan komunis, China lebih senang menggunakan “Sosialisme China”. Sementara untuk urusan eksternal (luar negeri), khususnya ekonomi, China mengadopsi sistem kapitalisme, yang mendukung sekali pasar bebas, “one country two system,” ke dalam “politik Panda” dan ke luar “politik Naga.”

AIIB belakangan juga difungsikan untuk ikut menguasai secara ekonomi terhadap negara-negara “millennium ketiga.” Sudut pandang geoekonomi, AIIB mencoba memainkan peran untuk menciptakan keseimbangan, dimana keseimbangan adalah memainkan peran dalam menguasai ekonomi atas negara-negara millennium ketiga.

China sepertinya melalui AIIB memanfaatkan momentum akibat buruknya citra kapitalisme di mata negara-negara millennium ketiga. Meski sebenarnya sebagaimana dikemukakan, jika urusan kepentingan politik dan ekonomi keluar, China sangat “pasar bebas.” Kapitalisme yang diidentikan dengan negara-negara Barat kerap menggunakan instrumen agresi militer, ini juga menambah keburukan kapitalisme. Perang di Kawasan Timur Tengah dan Afrika menjadi contoh, yang tak lain di balik perang tersebut sebenarnya ada penguasaan faktor-faktor produksi dalam hal ini sumber daya alam (minyak).

Perang Sinyal 4G dan 5G

Dalam ekspansi ekonominya di dunia, China membuat desain *Belt and Road Initiative* (BRI) yang fokus pada infrastruktur guna merealisasikan “Sabuk Ekonomi Jalan Sutera” (jalur darat) dan “Jalur Sutera Maritim” (rute laut), gabungan keduanya inilah yang dikatakan sebagai “Jalur Sutera” ketiga yang di ekspos pada 2015 lalu. Namun kini berubah nama menjadi *Digital Silk Road* (DSR). Tujuan DSR ini adalah meningkatkan konektivitas komunikasi internasional serta mendorong di-internasionalisasikan sejumlah perusahaan teknologi China. Dari kegiatan ekonomi berbasis digital itu, pada 2016 saja, China sudah

mengantongi 30 persen lebih dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ini kontras dengan kondisi perusahaan teknologi di Barat. Penggunaan data di negara mereka semakin ketat diawasi, sementara banyak perusahaan teknologi justru memperoleh dukungan politik dari pemerintah China. Akibat dukungan politik yang signifikan tersebut, banyak perusahaan teknologi China mengembangkan zona teknologi sebagai bagian dari agenda pemerintah China sendiri. Beberapa di antaranya adalah dukungan pembangunan 5G, internet industry, data besar (big data), teknologi komputasi awan dan kecerdasan buatan.

Kemudian adalah pengembangan kabel darat antara Eropa dan Asia yang dikerjakan oleh sejumlah perusahaan teknologi seperti China Telecom, China Mobile dan China Unicom. Termasuk Huawei (pemain utama nasional China) yang telah banyak mengerjakan proyek-proyek infrastruktur telekomunikasi di kawasan Afrika bertahun-tahun. Benar adanya, dukungan China untuk merambah ke digital global di dukung oleh Huawei, Alibaba, ZTE, Tencent. Mereka mendesain produk dengan kualitas baik, namun berbiaya rendah.

Negara-negara di Asia Tenggara merupakan sasaran pasar pengembangan BRI oleh China. China kini telah banyak membangun infrastruktur di sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti kereta api berkecepatan tinggi di Laos Utara, jalur pemipaan di Malaysia, pembangunan Pelabuhan Kyakpyu di Myanmar.

Di Indonesia sendiri, raksasa teknologi China menjadi pemain utama dalam e-commerce dan startup. Kita bisa lihat Alibaba yang mendirikan perusahaan e-commerce di Singapura yakni Lazada Group dengan pengguna di Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Kemudian Tencent yang telah berhasil melahirkan Grab dan Go-Jek dengan konsep industri berbagai kendaraan. Keduanya berhasil menggeser pemain sebelumnya, Uber. Alipay Jack Ma yang pentrasi pasar menawarkan layanan pembayaran elektronik di Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia dan Vietnam. Kemudian ada Ant Financial yang merupakan perusahaan induk yang memilih jalur merger, akuisisi, kemitraan dengan Ascend Money Thailand. Di Filipina dengan Mynt dan di Indonesia sendiri dengan Emtel.

Selain itu di Indonesia, Huawei dan ZTE membangun infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serat optik. Huawei Marine setidaknya telah menyelesaikan pembuatan

kabel bawah laut khususnya di Indonesia dan Filipina. Lihat juga perusahaan produsen asal China Oppo, Vivo, Huawei terus-terusan ekspansi pasar berusaha merebut pasar Samsung asal Korea Selatan. Di pasar Indonesia, Huawei telah meluncurkan jaringan 5G dan komputasi awan, dan Indonesia menjadi pilihan pusat data kedua setelah di Thailand.

Perusahaan raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Facebook, Google, Twitter terus berusaha mengejar berusaha mempertahankan eksistensinya di Asia Tenggara meski tidak seagresif perusahaan-perusahaan China bersaing dalam e-payment, pembangunan jaringan 5G dan komputasi awan.

Perang digital ini sudah pasti memberikan keuntungan yang sangat besar. Meski bukan tanpa ancaman, seperti kebocoran data dan informasi selalu menghantui. Keamanan data dan informasi merupakan hal yang tak kalah penting. Indonesia sebagai pangsa pasar menjanjikan, tetap harus bertindak hati-hati menyikapi perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dimainkan perusahaan-perusahaan teknologi China dan Amerika Serikat.

Perang Mata Uang

Dollar AS dan Euro bukanlah mata uang internasional yang sebenarnya. Lebih tepat dollar AS dikatakan sebagai mata uang negara tertentu dan Kawasan tertentu – eurozone yang “dipinjam” menjadi mata uang internasional. Hal inilah yang menyebabkan sistem moneter dan finansial global tidak simetris.

Negara pencetak uang internasional diberikan kekayaannya secara cuma-cuma oleh negara-negara di seluruh dunia. Paling tidak tercatat sebesar 11 triliun dollar AS – ekuivalen. Depresiasi mata uang internasional dalam hal ini dollar AS ikut pula ditanggung oleh negara-negara miskin kepada negara kaya, paling tidak sebesar 200 miliar dollar AS.

Sistem moneter internasional – dunia saat ini sangatlah kompleks dan rumit jika diurai. Ketika mata uang dipakai di luar wilayah negara si pemilik uang, maka sebenarnya hal itu ikut memperkaya negara si pemilik mata uang tadi. Kecenderungan jika terjadi depresiasi, maka akan selalu berujung pada utang. Dan utang selalu ditutupi dengan kebijakan mencetak uang sebagaimana yang kerap disodorkan ekonom maupun politisi.

Di Indonesia, biasanya pengelolaan bank sentral selalu dipengaruhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semisal, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggarap proyek senilai Rp1 triliun

yang dibiayai APBN, maka sebenarnya negara telah memberikan keuntungan kepada BUMN tersebut. Semestinya, pengerjaan proyek-proyek BUMN sudah dengan modal sendiri.

Dollar AS yang selama ini menjadi alat transaksi internasional (mata uang internasional) pada dasarnya beredar di Amerika Serikat hanya kisaran 50 persen, sisa 50 persennya lagi berada di luar wilayahnya. Jika kondisinya demikian, seandainya Amerika Serikat mengagresi ke sejumlah negara, seperti sekarang banyak di negara-negara Arab, maka secara tidak langsung negara lain ikut berkontribusi pendanaan perang tersebut.

Dengan kondisi yang demikian, wajar jika Amerika Serikat punya kemampuan melakukan perang mata uang – memonopoli pasar uang global. akumulasi dampak dari sistem moneter dunia yang kompleks ini adalah krisis moneter yang merupakan akumulasi dari semua mudharatnya sistem moneter dunia – internasional. Krisis moneter seperti piramida di mana pada bagian puncaknya adalah pemilik mata uang yang eksploitatif. Pada bagian tengahnya adalah negara-negara surplus dan bagian paling bawah piramida tak lain adalah negara-negara defisit. Dengan demikian secara tidak sadar, negara-negara di luar Amerika Serikat membentengi dollar itu sendiri.

Berkuasanya negara-negara Eropa terhadap perekonomian dunia itu berlangsung sejak dimulainya revolusi industri. Eropa ketika itu menguasai sektor manufaktur. China yang mencoba mengimbangi dominasi Amerika Serikat melalui AIB yang merupakan kelanjutan dari konsesus Beijing untuk melawan dominasi IMF dan World Bank yang adalah hasil konsesus Washington.

Akan tetapi adakalanya usaha China mengimbangi dominasi Amerika Serikat tersebut hanya bersifat sporadic dan idem dito, untuk mengorek keuntungan. Justru belakangan China menggunakan AIB sebagai lembaga pemberi pinjaman (utang) layaknya IMF, World Bank maupun Asian Development Bank (ADB). Bisa diartikan China memiliki tujuan yang sama, menguasai perekonomian dunia khususnya terhadap negara-negara berkembang sebagai market sebagaimana yang dilakukan Eropa.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China sebenarnya dalam rangka skenario menaikkan posisi tawar kedua negara sehingga strategis di mata dunia. Padahal, sebenarnya perang dagang pada hakikatnya justru terjadi antar-negara, tapi banyak yang tidak menyadari. Gagasan mengenai perlunya mata uang internasional yang bersifat organik sebenarnya

menjadi wacana yang menarik. Krisis ekonomi yang banyak terjadi di banyak negara tak lain disebabkan karena belum adanya mata uang internasional yang disepakati bersama.

Paling tidak model organik ini guna menghindari hegemoni dari sistem moneter internasional yang berlaku sekarang. Membutuhkan waktu yang panjang menyatukan berbagai negara atau menciptakan kepentingan bersama yang lebih besar agar tercipta sistem ekonomi yang berkeadilan. Itupun jika ada upaya mengarah kesana (kesepakatan adanya mata uang internasional organik), maka bisa dipastikan bakal berhadapan dengan kepentingan negara-negara kaya, khususnya para bankir elite global. Jangan sampai memberi ruang kepada para bankir elite global menerapkan monopoli uang gaya baru.

Bagaimana Indonesia menyikapi ini? sudah sepatutnya selain menguatkan kedaulatan moneternya, perlu juga rasanya Indonesia mengupayakan adanya kedaulatan siber. Ini terkait arah perubahan dari uang kartal menuju uang digital.

Ada negara yang mencetak uang, sementara lainnya membeli uang. Konsekuensinya Amerika Serikat dan Kawasan Euro bisa membeli apa saja dari seluruh negara di dunia hanya dengan mencetak uang di atas kertas. Mereka membeli emas dengan kertas. Sebaliknya, seluruh negara lainnya menjual apa saja untuk mendapatkan uang kertas.

Mereka membeli kertas dengan emas. Sistem moneter dan finansial global yang tidak simetris ini memicu biaya sangat mahal pada ekonomi dunia, biaya nilai tukar dan fluktuasi yang mencapai ratusan miliar dollar AS setiap tahun, penumpukan cadangan devisa senilai belasan triliun dollar AS, dua pertiga negara di dunia akhirnya terjebak pada utang luar negeri yang tidak bisa dibayar, perang massal yang melibatkan semua negara di dunia yang berlangsung puluhan tahun melahirkan fenomena “perlombaan terjun ke dasar” dan membuat sebagian besar negara berkembang terjebak dalam *middle income trap* (MIT), ketidakseimbangan global yang berkelanjutan dan terus membesar yang pada akhirnya menjadi lahan subur tumbuhnya krisis moneter yang terjadi secara berkala di seluruh dunia.

China sendiri telah mengumumkan peluncuran mata uang negaranya Yuan dalam bentuk Yuan digital. Lagi-lagi kemunculan yuan digital ini menjadi pertanda bahwa China tengah mencoba melepas ketergantungan pembayaran transaksi internasional dari dollar AS. Selain menghindari, China sepertinya ingin “melawan”

sistem keuangan internasional yang tunduk pada hukum Amerika Serikat.

Situs *blockchainmedia.id* pernah menurunkan laporan mengenai Bank Sentral Tiongkok (PBOC) yang dalam ujicoba yuan digital telah mencapai 3,13 juta transaksi. Setidaknya tercatat sebesar 1,1 miliar yuan, setara dengan Rp2,4 triliun. Bahkan China berencana akan menggunakan yuan digital dalam kegiatan transaksi pada perhelatan Olympiade musim dingin yang dijadwalkan pada 2022.

Kapitalisme Kroni

Bisa jadi inilah yang seperti dikemukakan Desmon Satria Andrian melalui sebuah artikelnya di situ *The Global Future* mengenai “kapitalisme kroni.” Siapa itu kapitalisme kroni? Pendapat Desmon berangkat dari penjelasan pola hubungan negara-negara Selatan dan Utara melalui eksplanasi “pembangunan keterbelakangan” yang disampaikan Andre Gunder Frank melalui bukunya “Capitalism and Underdevelopment in Latin America” yang diterbitkan pertama kali pada 1967. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang (UU) No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia.

Frank sendiri mengembangkan pandangan Raul Prebisch menyangkut negara-negara pusat dan pinggiran menjadi negara-negara metropolis dan negara satelit. Dalam gagasannya Prebisch banyak membicarakan aspek ekonomi dari negara-negara pusat dan pinggiran dengan melihat dari ketimpangan nilai tukar. Sebaliknya, Frank malah melihat aspek politik dari hubungan negara-negara metropolis dan negara satelit tadi. Hubungan yang dimaksud tak lain hubungan politis dan ekonomi, yakni antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa – menguasai negara-negara satelit.

Dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, kelompok borjuasi di negara-negara metropolis bekerjasama dengan pejabat pemerintah di negara-negara satelit dan kaum borjuasi yang dominan di negara satelit. Tuan tanah dan kaum pedagang merupakan contoh kelas borjuasi di negara-negara satelit. Sebagai akibat kerjasam antar-modal asing tadi dan pemerintah setempat, maka munculah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing dan borjuasi lokal. Kegiatan ekonomi praktis merupakan kegiatan ekonomi modal asing yang lokasinya di negara satelit.

Dalam teori Frank, terdapat tiga komponen utama yang digunakan; modal asing, pemerintah

lokal di negara satelit dan kelompok berjouis. Sehingga Frank mencirikan dari perkembangan kapitalisme satelit yakni; kehidupan ekonomi yang tergantung, terjadinya Kerjasama modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di negara satelit yaitu pejabat pemerintah, kelas tuan tanah, kelas pedagang dan masih terjadinya ketimpangan antara yang kaya – subjek eksploitasi dan yang miskin – objek eksploitasi di negara-negara satelit.

Di tengah memanasnya eskalasi perang dagang antara China versus Amerika Serikat, sepertinya Indonesia masih terjebak. Meski kondisi tersebut rada mahfum karena Indonesia masih masuk kategori negara berkembang – negara satelit. Beberapa kebijakan terbaru justru membuka ruang selebar-lebarnya terhadap investasi modal asing. Bisa kita lihat dari beberapa kebijakan yang oleh banyak kalangan dianggap kontroversi.

Contohnya: warga asing dari 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia, investor asing boleh memiliki proyek properti di Indonesia, pihak asing dibolehkan menguasai 100 persen saham industri gula, karet, usaha restoran, perusahaan jalan, pembangkit listrik dan usaha bioskop, kemudian modal asing boleh menguasai 85 persen saham modal ventura.

Situasi yang dialami Indonesia saat ini sebenarnya tidak bisa lepas dari kondisi politik yang pro modal. Pengaruh ini disebabkan oleh meluasnya geografi akumulasi (kebijakan pro pemodal global). Dengan demikian, Indonesia sangat dimungkinkan terus terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional.

Dulu Indonesia pernah membuat “jalan tengah.” Ketika friksi politik global vis a vis blok barat dan blok timur, Presiden Soekarno menggagas gerakan non blok, termasuk tawaran tengah ideologi ekonomi yakni ekonomi Pancasila.

Bagaimana dengan Indonesia?

Dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China menyebabkan peningkatan harga barang di China dan Amerika Serikat, terjadinya trade diversion yang membuka kran ekspor bagi negara ketiga (satelit) untuk mengisi pasar. Dampak lainnya, mengurangi permintaan bahan baku impor di Tiongkok dan Amerika Serikat khususnya bahan baku untuk barang-barang ekspor.

Di Indonesia sendiri, dampak perang dagang kedua negara tersebut sebenarnya tidak signifikan. Sebab, produk yang dikenakan tarif perang dagang bukan fokus pada produk ekspor Indonesia untuk kedua negara. Pangsa pasar Indonesia untuk Amerika Serikat dan China

relatif kecil, kemudian Indonesia bukan mitra dagang utama bagi Amerika Serikat, Indonesia berada di posisi 16 sebagai pemasok. Indonesia dominan hanya mengekspor produk-produk tradisional seperti sawit, barang dari karet dan karet.

Hanya saja, dari perang dagang tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki potensi peluang pasar untuk mengisi kekosongan pasar dari kedua negara. Semisal pasar produk buah-buahan dan benda dari baja serta aluminium, yang sebelumnya merupakan pasar Amerika Serikat di China, demikian sebaliknya. Dampak tidak langsung perang dagang Amerika Serikat dan China terhadap Indonesia adalah nilai tukar Indonesia yang mengakibatkan harga barang ekspor Indonesia terdepresiasi. Sudah barang tentu kondisi tersebut perekonomian Indonesia melambat.

Kondisi rentan perekonomian di Indonesia bukan berarti menyurutkan peluang untuk diperhitungkan sebagai kekuatan besar baru dalam rivalitas *major powers* dalam konstalasi perpolitikan maupun perekonomian global. Indonesia menjadi tumpuan dunia dalam proses pemulihan ekonomi dunia di masa mendatang. Bagaimana tidak, dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, Indonesia tetap menjadi rebutan banyak negara untuk berkontestasi sumber-sumber investasi baru.

Indonesia semestinya harus berupaya memaksimalkan perannya memperjuangkan kepentingannya, di saat negara-negara lain mengambil manfaat dari perang dagang Amerika Serikat dan China. Padahal Indonesia juga letaknya sangat strategis. Setidaknya 40 persen perdagangan internasional melalui jalur laut melewati perairan Indonesia. Sehingga posisinya harus menjadi kawasan strategis dengan melihat celah untuk memajukan perannya mendesain konsep kawasan baru.

Doktrin politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia harus terus di evaluasi, paling tidak mendesain hubungan yang setara guna mengurangi tekanan dan tidak terlalu bergantung dari Amerika Serikat dan China. Indonesia harus mampu menunjukkan kemampuannya dengan membangun kerjasama yang bernilai dan benar-benar menguntungkan Indonesia. Selain itu, sudah saatnya Indonesia memprioritaskan pengembangan produk-produk nasional.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka kesimpulan Indonesia di tengah himpitan perang dagang Amerika Serikat dan China di antaranya; Di Indonesia sendiri,

dampak perang dagang kedua negara tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan. Sebab, produk yang dikenakan tarif perang dagang bukan fokus pada produk ekspor Indonesia untuk kedua negara.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China sebenarnya juga memberikan peluang pasar untuk memenuhi kekosongan pasar dari kedua negara. Indonesia juga memiliki potensi menjadi negara yang diperhitungkan sebagai kekuatan besar dalam rivalitas *major power* dalam eskalasi geopolitik maupun geoekonomi. Sebab, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga mampu menciptakan sumber-sumber investasi baru.

Selanjutnya, Indonesia harus lebih memaksimalkan memperjuangkan kepentingannya di saat negara-negara lain mencoba mengambil manfaat dari perang dagang Amerika Serikat dan China. Dan Indonesia harus sudah mulai memprioritaskan peningkatan produk-produk nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi YS. (2019). Tentang Belitan Naga Digital China. <https://theglobal-review.com/tentang-belitan-naga-digital-cina/>, diakses 19 Agustus 2020, 13.17 Wib.
- Alunaza, Hardi. (2019). Indonesia di Tengah Rivalitas China, Jepang, dan India: Tinjauan Buku. *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol. 4, No. 2.
- Andrian, Desmon Satria. (2016). Kapitalisme Kroni Vs Neoliberalisme. <https://theglobal-review.com/kapitalisme-kroni-vs-neoliberalisme/>, diakses 24 September 2020, 14.22 Wib.
- Aprilianti, Vidya Andina. (2019). Implikasi Perang Dagang Amerika Serikat-China Terhadap Perdagangan Indonesia, Skripsi, Universitas Jember.
- Arum, Abdurrahman Rahman. (2020). *Demokrasi Mata Uang: Teori Moneter Global Organik*. Ed. 2. Jakarta, Global Currency Initiative.
- Arum, Abdurrahman. (2020). Presentasi Makalah "Dari Currency War menuju Democratic Global Currency, Mungkinkah?" Forum Satu Bangsa, International Politic Forum, Dialektik.id, Jakarta.
- Asmali, Aldia Santosa. (2020). Pengaruh Perang Dagang Amerika Serikat - China Terhadap Industri Tekstik di Indonesia. Tesis. FISIP UNPAS.
- CNBC Indonesia; <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201013105612-37-193878/gokil-uang-digital-yuan-sudah-ditransaksikan-rp-24-t>, diakses 14 Oktober 2020, 13.33 Wib
- Inayatul Bariah, Nuzulul Anam, A. Ghazi Mubarak, Sahril Fatkhur Rohman. (2020). Strategi Kebijakan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perang Dagang AS-China. *Jurnal Humaniora*, Universitas Abulyatama, Vol. 4 No. 2.
- Moelong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. ke-11. Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Munawaroh, Siti. (2019). Dampak Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok Terhadap Indonesia Tahun 2018. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Murtado, Roy. (2020). Presentasi Makalah "Generasi Muda dalam Dinamika dan Tantangan Sektor Pertanian dan Agraria, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta.
- Purnama, Yoga Indra. (2019). Dampak Perang dagang Amerika Serikat - China Terhadap Ekspor Batubara Indonesia ke China. Tesis. FISIP UNPAS.
- Ridwan. (2004). *Statiska untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan-Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung.